



BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Pembentukan Organisasi

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu perangkat daerah yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur guna membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, khususnya bertanggung jawab dibidang Komunikasi dan Informatika, terutama dalam pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan telekomunikasi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada publik.

Teknologi informasi dan komunikasi sudah memberikan berbagai bukti dan mampu menciptakan media yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu dalam mentransformasikan informasi dari dan ke berbagai penjuru dunia, sangat menjanjikan bagi institusi sebagai salah satu solusi dalam mewujudkan e-Government.

Pemerintah harus mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengolah, menyalurkan dan mendistribusikan informasi kepada internal pemerintah dalam mendukung proses pengambilan keputusan, sedangkan dalam lingkup eksternal untuk pelayanan masyarakat (*public services*). Dalam upaya mewujudkan implementasi *e-Government* cakupannya tidak hanya pada aspek teknis saja, akan tetapi mencakup aspek non teknis berupa komitmen dari pemerintah dan pucuk pimpinan institusi. Secara garis besar ada empat komponen pokok yang perlu terus didorong kesiapannya yakni infrastruktur (jaringan komunikasi dan informasi), konten, aplikasi, dan sumber daya manusia.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur nomor 09 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai implementasi dari terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.



B. Tugas dan Fungsi

1. Tugas Pokok

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan.

2. Fungsi

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintahan Daerah;
- b. Perencanaan pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika;
- c. Perumusan, Perencanaan pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis teknologi informasi dan komunikasi;
- d. Perumusan, Perencanaan pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis aplikasi informatika;
- e. Perumusan, Perencanaan pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis informasi dan komunikasi publik;
- f. Perumusan, Perencanaan pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pengawasan dan pengendalian;
- g. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. Pembinaan jabatan fungsional;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Struktur Organisasi

Susunan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur meliputi : 1 (satu) orang Kepala Dinas (Eselon IIa), 1 (satu) orang Sekretaris (Eselon IIIa), 4 (empat) Kepala Bidang (Eselon IIIa) dan 3 (tiga) Kepala Subbag (Eselon IVa) serta 12 Kepala Seksi (Eselon IVa).

Bagan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat.
 1. Subbag Umum.



- 2. Subbag Perencanaan.
- 3. Subbag Keuangan.
- c. Bidang Teknologi Informasi.
 - 1. Seksi Infrastruktur TIK.
 - 2. Seksi Pengelolaan data dan Integrasi Sistem Informasi.
 - 3. Seksi Keamanan Jaringan Informasi dan Komunikasi.
- d. Bidang Aplikasi dan Informatika.
 - 1. Seksi Pengelolaan Domain dan Aplikasi.
 - 2. Seksi Pengelolaan E-Government.
 - 3. Seksi Pengembangan SDM Teknologi Informasi.
- e. Bidang Pengawasan dan Pengendalian.
 - 1. Seksi WASDAL Informatika dan Penyiaran.
 - 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian KPU/USO.
 - 3. Seksi Sandi dan Telekomunikasi.
- f. Bidang Informasi Komunikasi Publik
 - 1. Seksi Pengelolaan Opini dan Komunikasi Publik.
 - 2. Seksi Pengelolaan Informasi Publik.
 - 3. Seksi Media Publik dan Pameran.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - 1. Pranata Humas
 - 2. Pranata Komputer





D. Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaltim berjumlah 121 orang terdiri dari 61 orang Pegawai Negeri Sipil dan 60 orang Non Pegawai Negeri Sipil (Tenaga Kontrak) yang ditempatkan di semua Bidang-Bidang. Untuk 60 Orang PNS berdasarkan tingkat pendidikannya sebagai berikut :

- a. Pasca Sarjana sebanyak 16 orang (15 %)
- b. Sarjana sebanyak 29 orang (56 %)
- c. Diploma sebanyak 1 orang (6 %)
- d. SLTA sebanyak 12 orang (21 %)
- e. SLTP sebanyak 1 orang (1 %)
- f. SD sebanyak 1 orang (1%)

Tabel.1.2

Data Aparatur Dinas Kominfo Provinsi Kaltim Tahun 2018

No	Jabatan	Pangkat / Golongan	Pendidikan	JENIS KELAMIN	
				Laki2	Perempuan
1	Kepala Dinas	Pembina Utama Muda/ IV-d	S2	1	
2	Sekretaris	Pembina Tk. I/ IV-b	S2		1
3	Kepala Bidang	Pembina Tk. I/ IV-b	S2	1	1
		Pembina/ IV-a	S2		
4	Kepala Sub Bagian	Pembina/ IV-a	S2		1
		Penata Tk. I/ III-d	S1	1	2
		Penata / III-c	S2		
		Penata / III-c	S1	1	
5	Kepala Seksi	Pembina Tk. I/ IV-b	S1		1
		Pembina/ IV-a	S2	2	3
		Penata Tk. I/ III-d	S1	5	
		Penata / III-c	S1	1	



6	Staf	Pembina Tk. I/ IV-b	S1		
		Penata Tk. I / IV-a	S2		
		Penata Tk. I / III-d	S1		1
		Penata /III-c	S1	3	2
		Penata /III-c	SMA	1	
		Penata Muda Tk.I/ III-b	S1	6	1
		Penata Muda Tk.I/ III-b	SMA	3	1
		Penata Muda/ III-a	S2		1
		Penata Muda/ III-a	S1	4	2
		Penata Muda/ III-a	D3		1
		Penata Muda/ III-a	SLTA		1
		Pengatur Tk. I/ II-d	D3		
		Pengatur Tk. I/ II-d	SLTA	4	
		Pengatur/ II-c	S1		1
		Pengatur/ II-c	SLTA	3	2
		Pengatur Muda Tk. I/ II-b	SLTA	1	1
		Pengatur Muda/ II-a	SMA	1	
		Pengatur Muda/ II-a	SLTP	1	
		Pengatur Muda/ II-a	SD	1	
Total			60	40	20

**DAFTAR NAMA KARYAWAN NON-PNS DISKOMINFO PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR PER 1 OKTOBER 2018**

No	Nama	Nomor SK Kontrak	Tempat Tanggal Lahir	Penugasan	Pendidikan Terakhir	Unit Kerja	TMT Masuk Kerja	Ket
1	Indra Wahyu di	814.1 / 011/ DISKOMINFO / 2018	Samarinda 13 September 1979	Membantu Pengelola Teknologi Informasi	SMK	TIK	Tahun 2009	



2	Norfia nsyah	814.1 / 049/ DISKOMINF O / 2018	Samarinda 1 November 1988	Sopir	SLTA	Sekre tariat	01-Mar- 11	
3	Harfia nsyah	814.1 / 048/ DISKOMINF O / 2018	Samarinda 26 November 1986	Satpam	SLTA	Sekre tariat	01-Jun- 11	
4	Tomm y Pranat a	814.1 / 013/ DISKOMINF O / 2018	Loa Kulu 8 Mei 1993	Membantu Administrasi Keuangan	SMK	Sekre tariat	02-Jan- 11	
5	Resty Rianita Marish a	814.1 / 025/ DISKOMINF O / 2018	Batu Kajang 9 Februari 1987	Membantu Operator Web	SI Ilmu Kompute r	Wasd al	01-Jul- 11	
6	Teguh Praset yo	814.1 / 012/ DISKOMINF O / 2018	Samarinda 4 Februari 1987	Sebagai Fotografer/ Kameramen	SI. Ilmu Komunik asi	IKP	01-Mar- 11	
7	Rizki Kurnia wan	814.1 / 018/ DISKOMINF O / 2018	Samarinda 14 April 1990	Sebagai Pengelola data Informasi	SI. Ilmu Komunik asi	IKP	01-Mar- 11	
8	Edyra Syahm iar Samad	814.1 / 017/ DISKOMINF O / 2018	Samarinda 30 November 1993	Membantu Administrasi Bidang	SMK	IKP	01-Jun- 11	
9	Yudi Sujaya	814.1 / 060/ DISKOMINF O / 2018	Samarinda 3 September 1990	Membantu Adminitrasi Bidang	SLTA	Sekre tariat	12-Jan- 12	
10	Garso n	814.1 / 019/ DISKOMINF O / 2018	Buton, 31 desember 1987	Membantu Adminitrasi Bidang	D3 Akuntans i	TIK	01-Apr- 12	
11	Robbi Sugara	814.1 / 021/ DISKOMINF O / 2018	Samarinda 8 Februari 1978	Membantu Caraka	SLTA	Sekre tariat	02-Jan- 13	
12	Aswan Jaya	814.1 / 020/ DISKOMINF O / 2018	Samarinda 7 Februaru 1966	Sopir	SMEA	Sekre tariat	02-Jan- 13	
13	Raenal dy Ferryz a	814.1 / 024/ DISKOMINF O / 2018	Samarinda 3 Oktober 1988	Membantu Pengelola Data Pelak.Program Anggaran	SLTA	Sekre tariat	01-Mar- 13	
14	Mega Jiana	814.1 / 026/ DISKOMINF	Samarinda 22 Maret 1989	Membantu Administrasi Bidang	SI Sistem Informasi	TIK	28-Jan- 13	



		O / 2018						
15	Prabawati Maris	814.1 / 035 / DISKOMINF O / 2018	Samarinda 24 September 1988	Membantu sebagai Reporter	SI. Ilmu Komunikasi	IKP	02-Jan-13	
16	Arinda Lola Amelia	814.1 / 028 / DISKOMINF O / 2018	Samarinda 10 Agustus 1991	Membantu Adminitrasi KIP	D3. Akuntansi	IKP	02-Jan-13	
17	Yana Nasdiah	814.1 / 014 / DISKOMINF O / 2018	Samarinda 21 Oktober 1985	Membantu Adminitrasi Bidang	SI Komputer	Sekretariat	02-Jan-13	
18	Eka Indah Justiani	814.1 / 030 / DISKOMINF O / 2018	Samarinda 22 Juni 1988	Membantu Adminitrasi Bidang	SI. Ilmu Komunikasi	Wasdal	02-Jan-13	
19	Irmah	814.1 / 016 / DISKOMINF O / 2018	Buton 10 Nopember 1989	Membantu Adminitrasi KIP	SI Pendidikan Bahasa Inggris	KIP	02-Jan-13	
20	Adib Rifaldy	814.1 / 022 / DISKOMINF O / 2018	Samarinda 8 November 1988	Membantu Administrasi LPSE	SI. Teknolgi Informasi	APTIK A	02-Jan-13	
21	Jayanti Riana Putri	814.1 / 029 / DISKOMINF O / 2018	Tanjung Selor, 8 Januari 1989	Membantu Administrasi LPSE	D3 Akademi Sekretaris	APTIK A	01-Mar-13	
22	Nanda Tridina putri	814.1 / 033 / DISKOMINF O / 2018	Samarinda 6 Januari 1990	Membantu Administrasi Bidang	Si. Ekonomi	APTIK A	02-Jan-13	
23	Hamsyah Yusuf Ruslan	814.1 / 023 / DISKOMINF O / 2018	Samarinda 10 Juni 1989	Membantu Administrasi TIK	D3. Teknologi Informasi	Sekretariat	02-Jan-14	
24	Pablo Febriano Yusnan	814.1 / 047 / DISKOMINF O / 2018	Surabaya 9 Februari 1992	Membantu Pengelola Teknologi Informasi	SI Komputer	TIK	02-Jan-14	
25	Nichita Herynanda Putri	814.1 / 034 / DISKOMINF O / 2018	Samarinda 22 Februari 1990	Membantu sebagai Repoter	Si Ilmu Komunikasi	IKP	02-Jan-14	
26	Edwin Derry Mahat	814.1 / 031 / DISKOMINF	Samarinda 26 Februari 1987	Membantu Pengelola Data Informasi	Si. Ilmu Hukum	IKP	02-Jan-14	



	ma	O / 2018							
27	Desy Ariani	814.1 / 015 / DISKOMINF O / 2018	Samarinda 20 Desember 1990	Membantu sebagai Fotografer/Kameramen	Si Ilmu Komunikasi	IKP		02-Jan-14	
28	Arfam Brian Pradipana	814.1 / 051 / DISKOMINF O / 2018	Samarinda 4 Januari 1991	Membantu Pengelola Teknologi Informasi	Si. Kehutanan	Wasd al		02-Jan-14	
29	Ade Yulia Israwati	814.1 / 032 / DISKOMINF O / 2018	Samarinda 16 Maret 1988	Membantu Administrasi LPSE	Si. Ekonomi	APTIK A		02-Jan-14	
30	M. Navita Sandy Al Gamar	814.1 / 027 / DISKOMINF O / 2018	Waru 1 Maret 1988	Membantu Pengumpulan Data Bahan Perencanaan	SI. Pendidikan	Sekretariat		02-Jan-15	
31	Harmita Muchtar	814.1 / 038 / DISKOMINF O / 2018	Samarinda 26 Agustus	Membantu Adminstrasi Bidang	SI. Manajemen	Wasd al		01-Feb-15	
32	Ariyadi	814.1 / 036 / DISKOMINF O / 2018	Samarinda 18 Juli 1989	Membantu Pengurusan Barang	Si. Hubungan Internasional	Sekretariat		02-Jan-15	
33	Veby Regina	814.1 / 039 / DISKOMINF O / 2018	Samarinda 14 April 1997	Membantu Administrasi Bidang	SLTA	Wasd al		02-Jan-15	
34	Leliyana Andriyani	814.1 / 044 / DISKOMINF O / 2018	Samarinda 22 Oktober 1993	Membantu sebagai Fotografer/Kameramen	SI. Ilmu Komunikasi	IKP		02-Jan-15	
35	Intan Permata Sari	814.1 / 050 / DISKOMINF O / 2018	Samarinda 21 Nopember 1990	Membantu Administrasi Bidang	SMK	KIP		02-Feb-16	
36	Rizki Eka Hidayah Yusuf	814.1 / 046 / DISKOMINF O / 2018	Samarinda 14 Agustus 1992	Membantu Administrasi Bidang	SMA	Sekretariat		02-Jan-16	
37	Riska Ayu Amalia	814.1 / 040 / DISKOMINF O / 2018	Samarinda 18 agutus 1993	Membantu Administrasi Bidang	SMA	KIP		02-Jan-16	
38	Febri Irawan	814.1 / 045 /	Samarinda 25 Februari	Membantu Operator Web	SI. Ekonomi	Wasd al		02-Jan-16	



		DISKOMINFO / 2018	1984					
39	Dwinie Puji Susanti	814.1 / 043 / DISKOMINFO / 2018	Samarinda 11 April 1993	Membantu Verifikator Keuangan	SI Akuntansi Manajerial	Sekretariat	02-Jan-16	
40	Muhammad Aulia Fadoli	814.1 / 042 / DISKOMINFO / 2018	Samarinda 6 Mei 1993	Membantu Administrasi Keuangan	SI Akuntansi Manajerial	KIP	02-Jan-16	
41	Aris Nur Herlan	814.1 / 052 / DISKOMINFO / 2018	Samarinda 28 September 1987	Satpam	SI. Pendidikan	Sekretariat	02-Jan-16	
42	Nurhasanah	814.1 / 041 / DISKOMINFO / 2018	Samarinda 28 Juni 1992	Membantu Administrasi Bidang	SI. Ilmu Pemerintahan	Sekretariat	02-Jan-16	
43	Yhuyun Putriani	814.1 / 096 / DISKOMINFO / 2018	Samarinda 19 Mei 1988	Membantu Administrasi Bidang	SI. Ilmu Komunikasi	Sekretariat	02-Jan-16	
44	Rizki Amalia Ananda	814.1 / 053 / DISKOMINFO / 2018	Samarinda 8 Agustus 1992	Membantu Administrasi Bidang	D3 Administrasi Bisnis	KIP	02-Jan-16	
45	Herlina Astuti	814.1 / 062 / DISKOMINFO / 2018	Samarinda 21 Oktober 1991	APTIKA	D.2	APTIKA	01-Jan-17	
46	Juriansyah	814.1 / 059 / DISKOMINFO / 2018	Samarinda 14 Agustus 1990	Satpam	SMA	Sekretariat	02-Jun-17	
47	Randy Maraki	814.1 / 058 / DISKOMINFO / 2018	Samarinda, 21 Desember 1993	Satpam	SMA	Sekretariat	02-Jun-17	
48	M. Wahyudi Prasetyo	814.1 / 054 / DISKOMINFO / 2018	Samarinda 18 Oktober 1973	Satpam	SMA	Sekretariat	02-Jun-17	
49	Firstmay Erwindia Kasih	814.1 / 066 / DISKOMINFO / 2018	Samarinda 23 mei 1994	Membantu Administrasi Bidang	SMA	Sekretariat	08-Jun-17	
50	Yenny Chinty	814.1 / 063 / DISKOMINFO	Samarinda 01 Juni 1994	Membantu Administrasi Umum	SI Ekonomi	Sekretariat	04-Sep-17	



	a	O / 2018						
51	Indira Silvianta	814.1 / 064 / DISKOMINFO / 2018	Sangkulirang 17 Mei 1994	Membantu Administrasi Umum	SMA	Sekretariat	04-Sep-17	
52	Dafied Ryan	814.1 / 068 / DISKOMINFO / 2018	Samarinda 8 Januari 1990	Membantu Administrasi Kepegawaian	SMA	Sekretariat	01-Nov-17	
53	Irfani Kholidi	814.1 / 061 / DISKOMINFO / 2018	Pegatan, 02 Agustus 1991	Membantu Administrasi KIP	SM	KIP	01-Feb-17	
54	Puput Rahmadaniah	814.1 / 067 / DISKOMINFO / 2018	Samarinda, 11 Maret 1994	Membantu Administrasi KIP	SMA	KIP	01-Agu-17	
55	Muhammad Iqbal	814.1 / 057 / DISKOMINFO / 2018	Samarinda, 26 Januari 1992	Membantu di Bidang TIK	ST	TIK	02-Okt-17	
56	Ratna Juwitasari	814.1 / 056 / DISKOMINFO / 2018	Samarinda 16 Maret 1990	Membantu Pengelola Data Informasi	SI. Ilmu Komunikasi	IKP	03-Jan-17	
57	Eka Rahmah Eliyani	814.1 / 073 / DISKOMINFO / 2018	Samarinda 15 Agustus 1990	Membantu Pengelola Data Informasi	SI. Ilmu Komunikasi	IKP	03-Jan-17	
58	Rizmalani Syawitri	814.1 / 086 / DISKOMINFO / 2018	Samarinda, 18 Maret 1993	APTIKA	S.SOS	APTIKA	01-Mar-18	
59	Nydia Amelinda Putri	814.1 / 069 / DISKOMINFO / 2018	Samarinda 10 Februari 1993	Membantu Pembuat Dokumen	SI. Teknik Telekomunikasi	Sekretariat	02-Jan-18	
60	Budi Prayitno	814.1 / 055 / DISKOMINFO / 2018	Samarinda, 18 Maret 1979	Satpam	SMA	Sekretariat	02-Jan-18	

Total NON PNS :

SMP	=	1
SMA/SMK/SMEA/D1/D2	=	23
D3	=	5
S1	=	31
Total		60



Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan					
	Laki-Laki	Perempuan	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana	Dipl	SLT A	SLT P	S D
Kepala Dinas	1		1				1					
Sekretaris		1	1				1					
Kepala Bidang	2	1	2	1			2	1				
Kepala Seksi	7	3	5	5			5	5				
Kepala Sub Bagian	2	3	1	4			1	4				
Pengadministrasian Sandi		1		1				1				
Staff Sub Bag Umum	1	1	1	1				2				
Operator Mesin Sandi	2			2						2		
Pranata Humas Muda	1			1				1				
Pengelola Data Perkara	1			1				1				
Jurnalis	1			1				1				
Pranata Humas Pertama		1		1				1				
Pengelola Teknologi Informasi	2	1		3				3				
Pengadminitrasi Umum	1	3		4					1	3		
Pembuat Daftar Gaji		1		1						1		
Teknisi Mesin Sandi	1			1						1		
Staf Seksi Monitoring dan Evaluasi	1			1				1				
Staf Seksi Aplikasi Teknologi	1			1				1				
Pengelola Data Barang Hasil Penindakan	1			1						1		
Pranata Komputer Pertama	3	1		4			1	3				
Pengadministrasi Umum di Bidang	1	1		1	1			1		1		
Juru Bayar		1		1						1		
Pengadministrasi Kepegawaian		2		1	1			1		1		



Bendahara	1			1				1				
Pembantu Monitoring Sistem Penyiaran	1			1						1		
Verifikator Bidang Perizinan	1			1						1		
Pengelola Barang Inventaris	1			1						1		
Koordinator Tenaga Pemantau	1			1						1		
Koordinator Monitoring Tenaga Pemantau dan Operator	1			1						1		
Penginventarisasi Barang	1			1						1		
Pengelola Kepegawaian		1		1				1				
Pengemudi	1			1								1
Pengadministrasi	1			1								1
Calon Pranata Komputer		1		1				1				
Arsiparis dan Caraka	1			1						1		
Staff Sub Bagian Tata Usaha	1			1						1		
Jlh PNS	40	23	11	39	13	0	11	30	1	19	1	1
Jlh Honor/PTT	30	30						34	5	20	1	
Jlh PNS + Honor/PTT	70	53	1	3	1	0	11	64	6	39	2	1

E. Aspek Strategis Organisasi

Beberapa kekurangan aspek pendukung visi dan misi yang dihadapi Diskominfo tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (*e-Government*) dalam urusan pemerintahan di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Hal tersebut dapat dinilai dari lima dimensi diantaranya kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan. Masing-masing dimensi itu nantinya akan memiliki bobot yang sama dalam penilaian karena semuanya penting, saling terkait dan saling menunjang antara satu dengan yang lainnya.



a. Kebijakan

Kebijakan sangat erat kaitannya dengan produk hukum dan juga dokumen-dokumen resmi yang mempunyai tujuan untuk memberi arah dan mendorong pemanfaatan TIK.

b. Kelembagaan

Kelembagaan berkaitan erat dengan keberadaan organisasi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengembangan dan pemanfaatan TIK.

c. Infrastruktur

Infrastruktur berkaitan dengan sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan dan pemanfaatan TIK Di Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim sebagai berikut :

- *Bandwith* teresterial.
- Satelit

Dalam pelaksanaannya kegiatan diatas menggunakan biaya yang besar karena masih menyewa *bandwith* dalam jumlah besar, sehingga perlunya di bangun jaringan dalam bentuk *Fiber Optic* (FO) untuk optimasi dalam hal infrastruktur.

d. Aplikasi

Aplikasi berkaitan dengan ketersediaan dan dimanfaatkannya piranti lunak aplikasi yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- Dapat bekerja sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang ada (ketersediaan infrastruktur, sumber daya manusia, dan lain-lain).
- Berfungsi mendukung proses kerja yang efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara maksimal.
- Membawa dampak positif bagi efisiensi dan efektifitas kualitas pelayanan.
- Mampu mengikuti perubahan dari waktu ke waktu dengan mudah.

e. Perencanaan

Perencanaan berkaitan dengan proses perencanaan dengan indikator antara lain:

- Adanya proses perencanaan untuk pengembangan dan pemanfaatan TIK yang dilakukan secara nyata.



- Adanya kajian kebutuhan dan strategi penerapan TIK yang lengkap yang terdiri atas : tujuan, manfaat, gambaran kondisi saat ini, pemilihan teknologi kebutuhan sumber daya, pendekatan, penentuan prioritas, biaya dan antisipasi kebutuhan di masa yang akan datang.
2. Kurangnya pengetahuan masyarakat Kalimantan Timur akan informasi pembangunan daerah. Hal ini disebabkan oleh kurang tersedianya sistem, metode, dan pelayanan kepada masyarakat mengenai informasi pembangunan daerah. Terlebih lagi setelah berlakunya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengharuskan untuk memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat terutama tentang pembangunan daerah. Akan tetapi masih terdapat kendala yang dihadapi seperti regulasi yang tumpang tindih, *mindset* yang belum mendukung, dan kultur keterbukaan yang belum berkembang.
- Diharapkan dengan memberikan sebuah sistem dan metode penyerbaluasan serta pelayanan informasi kepada masyarakat dapat memberikan kepuasan masyarakat dalam hal pembangunan secara menyeluruh. Disamping itu perlunya kerjasama dengan pihak terkait seperti TVRI, RRI, Komisi Informasi Prov. Kaltim, Komisi Penyiaran Daerah Kalimantan Timur, radio swasta, dan instansi terkait lainnya.
3. *Blankspot* yang masih terjadi di beberapa daerah di Provinsi Kalimantan Timur dikarenakan minimnya infrastruktur telekomunikasi.
- Datanya adalah sebagai berikut :

Tabel. 1.1.
DATA DAERAH BLANK SPOT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018

NO.	KABUPATEN/ KOTA	JML KECAMATAN	JML DESA/ KEL.	COVERAGE TELEKOMUNIKASI	
				KECAMATAN	DESA/ KEL.
1	Kota Samarinda	10	53	10	53



2	Kota Balikpapan	5	27	5	27
3	Kabupaten Kutai Kartanegara	18	228	18	161
4	Kota Bontang	3	15	3	15
5	Kabupaten Penajam Paser Utara	4	54	4	41
6	Kabupaten Paser	10	137	10	102
7	Kabupaten Kutai Timur	18	136	18	73
8	Kabupaten Berau	13	110	13	55
9	Kabupaten Kutai Barat	16	198	16	80
10	Kabupaten Mahakam Hulu	5	49	5	19
TOTAL :		102	1,007	102	626

*Sumber : Bidang Wasdal Diskominfo Prov. Kaltim 2016

F. Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaltim dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dihadapkan oleh masalah yang terjadi sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung menjadi tantangan dalam proses pemerintahan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, permasalahan utama (Isu Strategis) yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaltim adalah sebagai berikut :

- a. Dalam perumusan kebijakan teknis bidang Komunikasi dan Informatika sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah, yaitu perbaikan tata kelola pemerintahan melalui optimalisasi pemanfaatan IT dalam manajemen pemerintahan masih kurangnya dukungan kebijakan teknis dalam bidang Komunikasi dan Informatika.
- b. Dalam perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis teknologi informatika dan aplikasi telematika masih kurangnya infrastruktur jaringan TI baik secara makro ataupun mikro sebagai penunjang aplikasi



pelayanan publik serta aplikasi yang dibuat oleh masing-masing SKPD untuk pelayanan publik masih belum terintegrasi secara optimal sehingga memungkinkan untuk diretas (*crack*) oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Disamping itu masih kurangnya pengembangan kemampuan sumber daya manusia dalam Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.

- c. Dalam perumusan, perencanaan pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis Informasi Komunikasi Publik masih sangat minimnya pengetahuan masyarakat tentang informasi mengenai pembangunan di Kalimantan Timur meskipun banyak infrastruktur yang telah dibangun oleh Gubernur Kaltim.
- d. Dalam perumusan, perencanaan pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis Pengawasan dan Pengendalian masih adanya daerah *blank spot* di wilayah Provinsi Kalimantan Timur terutama di daerah perbatasan, pedalaman, dan daerah tertinggal dimana pihak swasta tidak memungkinkan untuk membangun infrastruktur tersebut dikarenakan belum dinilai menguntungkan.
- e. Kurangnya kerjasama dan koordinasi dengan lembaga atau instansi vertikal dalam bidang Kominfo dengan tujuan melayani penyebaran informasi pembangunan daerah.

G. Sarana dan Prasarana Kerja Perangkat Daerah

Sarana dan Prasarana Kerja Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Banyaknya	Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Tanah	2242	m2	Luas Tanah Kantor Diskominfo Kaltim
2	Gedung	2	Unit (2 lantai)	
		2014	m2	
3	Listrik	3	Jaringan	NOC, Kantor dan Tower IT
4	Air	1	Kubik	



5	Telepon	2	Line	Ruang Kadis dan Kantor
6	Area Parkir	1	Area	
7	Ruang Rapat	1	Ruang	Ruang Warung Informasi Etam Kaltim
8	Ruang Arsip	1	Ruang	Ruang sebelah NOC
9	Koperasi	-	Buah	
10	Taman Dalam	1	Area	Taman / Kolam



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala, dan ancaman yang mungkin terjadi.

Dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi, maka ditetapkan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur yang terdiri dari sasaran dan indikator kinerja yang harus dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur selama 5 (lima) tahun mulai 2013-2018.

Secara umum sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018 senantiasa mengacu dan berpedoman kepada visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana termuat dalam rencana Strategis yang telah ditetapkan.

1. Visi

Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur merupakan gambaran kondisi kedepan yang mendukung visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maka ditetapkan visi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur yaitu :

“Terwujudnya Akses Komunikasi dan Informatika yang Berkualitas di Wilayah Kalimantan Timur.”

2. Misi

Misi merupakan penjabaran dari visi dan misi yang berfungsi untuk menjelaskan mengapa suatu organisasi harus ada, apa yang harus dilakukan serta bagaimana cara melakukannya.



Untuk mendukung tujuan yang dicita-citakan sesuai visi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, maka ditetapkan beberapa misi sebagai penjabarannya yaitu antara lain :

- a. Mengedepankan aspek sistem pelayanan publik yang profesional dan berkualitas serta berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Komunikasi dan Informasi Publik.
- b. Penyediaan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi yang berkualitas.

3. Tujuan

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur dapat mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai, dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kalimantan Timur. Agar dapat diukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan strategisnya, maka setiap tujuan strategis yang ditetapkan disertai indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur. Rumusan tujuan strategis tersebut diuraikan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan sistem pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informatika.
- b. Menciptakan transparansi terhadap sistem pemerintahan kepada masyarakat serta mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pembangunan di Kaltim.
- c. Mengurangi kesenjangan informasi di segenap lapisan masyarakat Kalimantan Timur.

Tabel.2.1.
Tabel Perencanaan Strategis

No	TAMBAH	MUTU/SMART/AMBI	LOKUS/STRATEGIS	PRAKTIK/INDIKATOR	PENGUKUR/RELEVAN	SATUAN	WAKTU/ALOKASI	TARGET/PERENCANAAN STRATEGIS					
								2015	2016	2017	2018		
1								100%	100%	100%	100%		
2								100%	100%	100%	100%		
3								100%	100%	100%	100%		



4. Sasaran

Dalam mewujudkan tujuan strategis tersebut, sasaran yang ingin dicapai adalah :

- a. Meningkatkan sarana dan prasarana teknologi komunikasi dan informasi yang menunjang kegiatan pemerintah daerah.
- b. Terwujudnya keterbukaan informasi dengan meningkatkan sistem, metode, dan mutu penyebaran serta pelayanan informasi kepada masyarakat..
- c. Tersedianya infrastruktur bidang komunikasi dan informasi dalam pemenuhan kebutuhan akses informasi kepada masyarakat.

5. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang tersebut diatas, maka ditetapkan strategi dalam bentuk kebijakan. Kebijakan tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan. Program merupakan kumpulan kegiatan/aktivitas secara sistematis dan terpadu yang akan ditetapkan. Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam kurun waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada guna mencapai tujuan dan sasaran.

strategi dan arah kebijakan berdasarkan penjabaran dari sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim tahun 2013-2018.

Strategi

- a) Meningkatkan indeks pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam pelaksanaan pemerintahan.
- b) Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai informasi pembangunan daerah.
- c) Pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk mengakses informasi.

Arah Kebijakan

- a) Pengembangan infrastruktur teknologi informasi dalam pelaksanaan pemerintahan.
- b) Pengembangan sistem informasi terpadu yang terintegrasi dengan pembangunan di Kalimantan Timur.
- c) Pengembangan sistem penyebaran informasi pembangunan daerah.



- d) Evaluasi kepuasan publik terhadap penyebaran informasi pembangunan di Kalimantan Timur.
- e) Membangun infrastruktur telekomunikasi untuk menunjang akses informasi masyarakat secara luas dengan menghilangkan daerah *blankspot*.

6. Indikator Kinerja Sasaran

Berdasarkan atas tujuan kemudian dijabarkan dalam sasaran – sasaran strategis yang akan dicapai dalam satu tahun selama periode Renstra. Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilannya tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel.2.2.
Sasaran dan Indikator

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan sistem pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi.	Meningkatkan sarana dan prasarana teknologi komunikasi dan informasi yang menunjang kegiatan pemerintah daerah.	Jumlah interoperabilitas sistem informasi	Aplikasi	Integrasi aplikasi	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
2	Menciptakan transparansi terhadap sistem pemerintahan kepada masyarakat serta mengetahui tingkat	Terwujudnya keterbukaan informasi dengan meningkatkan sistem, metode, dan mutu penyebarluasan	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat dalam memperoleh informasi	Persen	Peningkatan Tata laksana Komunikasi dan Informatika	Pengolahan dan Inventarisasi Data dan Penyajian Informasi Kebijakan Pemerintah



	kepuasan masyarakat terhadap pembangunan di Kaltim.	an serta pelayanan informasi kepada masyarakat.				Daerah
3	Mengurangi kesenjangan informasi di segenap lapisan masyarakat Kalimantan Timur.	Tersedianya infrastruktur bidang komunikasi dan informasi dalam pemenuhan kebutuhan akses informasi kepada masyarakat	Persentase Coverage Area	Persen	Sarana Prasarana Telekomunikasi	Pembangunan Tower di 7 Kabupaten Kota

7. Program Kegiatan

Tahun 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya memiliki program-program kegiatan baik program dan kegiatan prioritas maupun program dan kegiatan pendukung yang sinergis dengan program dan kegiatan prioritas yaitu :

Program Diskominfo Prov. Kaltim Tahun 2018 :

1. Program Pelayanan administrasi perkantoran.
2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah.
4. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa.

Kegiatan Diskominfo Prov. Kaltim Tahun 2018 :

1. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
2. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
3. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
4. Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah
5. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi



B. Indikator Kinerja Utama

Pada Sub bab ini disajikan IKU Tahun 2013-2018 Diskominfo Prov. Kaltim, yaitu :

Tabel.2.3.
IKU Tahun 2013 - 2018

No	Sasaran/Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Alasan	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatkan sarana dan prasarana teknologi komunikasi dan informasi yang menunjang kegiatan Pemerintah Daerah.	1. Jumlah Aplikasi Terintegrasi	Meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan sistem pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi	Jumlah SKPD dan Aplikasi yang diintegrasikan	Renstra Diskominfo 2013-2018	Diskominfo Prov. Kaltim
2	Terwujudnya Keterbukaan Informasi dengan meningkatkan sistem, metode, dan mutu penyebaran serta pelayanan informasi kepada masyarakat	1. Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat dalam memperoleh informasi	Menciptakan transparansi terhadap sistem pemerintahan kepada masyarakat serta mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pembangunan Kaltim	Rasio total nilai perusur dan unsur yang terisi	Renstra Diskominfo 2013-2018	Diskominfo Prov. Kaltim
3	Tersedianya infrastruktur bidang Komunikasi dan Informasi dalam pemenuhan kebutuhan akses informasi kepada masyarakat	1. Persentase Coverage area	Mengurangi kesenjangan informasi di segenap lapisan masyarakat Kalimantan Timur	Rasio daerah coverage dan jumlah desa di Kaltim	Renstra Diskominfo 2013-2018	Diskominfo Prov. Kaltim

C. Perjanjian Kinerja

Rencana Kerja merupakan penjabaran lebih lanjut daripada sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan dalam kurun waktu satu tahun.

Berdasarkan rencana kerja tahunan tersebut diatas, dan setelah disetujui anggarannya maka ditetapkan suatu Perjanjian Kinerja yang merupakan kesanggupan/janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasannya langsung.

Dalam tahun berjalan pelaksanaan kontrak kinerja akan dilakukan pengukuran untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang diwujudkan oleh organisasi yang dilaporkan dalam suatu laporan yaitu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).



Perjanjian kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/ Unit kerja dalam satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya sebagai berikut

Tabel.2.4.
Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2018
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan sarana dan prasarana teknologi komunikasi dan informasi yang menunjang kegiatan pemerintah daerah.	Jumlah interoperabilitas sistem informasi	Aplikasi	20 sistem informasi
2	Terwujudnya keterbukaan informasi dengan meningkatkan sistem, metode, dan mutu penyebarluasan serta pelayanan informasi kepada masyarakat..	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat dalam memperoleh informasi	Persen	55 %
3	Tersedianya infrastruktur bidang komunikasi dan informasi dalam pemenuhan kebutuhan akses informasi kepada masyarakat.	Persentase coverage area	Persen	80 %



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur telah diberikan penilaian Laporan Hasil Evaluasi AKIP yang mencakup Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Monitoring dan Evaluasi Kinerja serta Pencapaian Kinerja Diskominfo Prov. Kaltim Tahun 2017 yang dapat di lihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel.3.1.
Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Diskominfo Prov. Kaltim.

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai 2016	Nilai 2017
1	2	3	4	5
1	Perencanaan Kinerja	30 %	24,23	21,05
2	Pengukuran Kinerja	25 %	18,36	11,88
3	Pelaporan Kinerja	15 %	9,48	10,29
4	Monitoring dan Evaluasi Kinerja	10 %	5,67	4,08
5	Pencapaian Kinerja	20 %	5,42	8,75
	Nilai Hasil Evaluasi	100 %	63,16	56,05
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	AA	B	CC

Terhadap kondisi penilaian yang telah dikemukakan diatas, Diskominfo Prov. Kaltim akan melakukan tindak lanjut atas hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi AKIP Diskominfo Prov. Kaltim. Beberapa tindak lanjut di berbagai komponen kinerja yang akan dibenahi diantaranya adalah :

1. Akan melakukan review berkala Renstra sehingga ada perbaikan yang signifikan dan hasilnya akan diformalkan.
2. Menyelaraskan Dokumen PK dengan RPJMD/Renstra.
3. Monitoring pencapaian rencana aksi atas kinerja, target kinerja Eselon III dan IV secara berkala.
4. Pemberlakuan sistem “*Reward and Punishment*” kepada Pegawai Negeri Sipil.



5. Penyajian Informasi Keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi serta membangun mekanisme pengumpulan data kinerja yang memadai di dalam Laporan Kinerja.
6. Pantauan Rencana Aksi yang akan dilakukan secara bulanan.

B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan pengukuran pencapaian target kinerja yang telah dilakukan seperti tabel diatas, dengan 3 (tiga) indikator sasaran yang menjadi pengukuran capaian kinerja tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulanan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan sarana dan prasarana teknologi komunikasi dan informasi yang menunjang kegiatan Pemerintah Daerah.	Jumlah interoperabilitas sistem informasi	Aplikasi	20	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	4 4 4 8	-	0%
2	Terwujudnya keterbukaan informasi dengan meningkatkan sistem, metode, dan mutu penyebarluasan serta pelayanan informasi kepada masyarakat	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat dalam memperoleh informasi	Persen	55	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	10 10 10 15	83,94	28,94%
3	Tersedianya infrastruktur bidang Komunikasi dan Informasi dalam pemenuhan kebutuhan akses informasi kepada masyarakat	Persentase coverage area	Persen	80	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	15 15 15 25	-	0%



C. Analisis Capaian Kinerja

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur memiliki 3 Sasaran Strategis mengacu kepada Renstra tahun 2013-2018, yaitu :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana teknologi komunikasi dan informasi yang menunjang kegiatan Pemerintah Daerah.
2. Terwujudnya keterbukaan informasi dengan meningkatkan sistem, metode, dan mutu penyebaran serta pelayanan informasi kepada masyarakat
3. Tersedianya infrastruktur bidang Komunikasi dan Informasi dalam pemenuhan kebutuhan akses informasi kepada masyarakat

Alokasi dana tahun anggaran 2018 dalam mendukung kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp. 18.011.746.000,- dengan rincian capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel. 3.3.9
Analisis Capaian Kinerja Tahun 2018

SKPD	APBD	INDIKATOR KINERJA			Target Renstra	Realisasi (Persentase)
		Jumlah Interoperabilitas Sistem Informasi	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat dalam memperoleh informasi	Persentase Coverage Area		
Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim	Rp. 18.011.746.000,-	Jumlah Aplikasi yang terintegrasi	Jumlah masyarakat yang merasa puas dengan informasi yang telah diberikan	Jumlah Menara Telekomunikasi yang telah dibangun	Jumlah Aplikasi :20 Aplikasi Persentase IKM : 55 % Bebas Blankspot : 80%	Jumlah Aplikasi : 0 Aplikasi Persentase IKM : 28,94% Bebas Blankspot : 100%



Pembandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, seperti terdapat dalam tabel di bawah ini :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			% Peningkatan / Penurunan Tahun 2018
			2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	$7 = (6-5) / 5 * 100\%$
1	Jumlah Aplikasi Terintegrasi	Aplikasi	0	0	0	0%
2	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat dalam memperoleh informasi	Persen	60,36	70	83,94	13,94 %
3	Persentase Coverage Area	Persen	98	98	98	0%

Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja, program kegiatan, serta alternatif solusi di Diskominfo Prov. Kaltim adalah :

1. Keberhasilan / Kegagalan :

- Penyebab kegagalan kinerja untuk program kegiatan **Jumlah Interoperabilitas Sistem Informasi** yaitu sejak awal Renstra tahun 2013 sampai tahun 2018 kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan dikarenakan keterbatasan anggaran dan tidak adanya dana yang dialokasikan untuk program kegiatan ini.
- Untuk program kegiatan Persentase Coverage Area yang berhubungan dengan pembangunan Menara Telekomunikasi beserta BTS, tidak mengalami peningkatan sejak tahun 2016 dan sejak tahun 2016 itu pula kegiatan ini telah diambil alih oleh Kominfo Pusat. Provinsi Kaltim hanya berfungsi sebagai pengumpul usulan titik pembangunan dari Kabupaten/Kota dan juga sebagai pengawas pembangunan menara telekomunikasi.

2. Peningkatan / Penurunan :

- Untuk program kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat mengalami peningkatan pada Tahun 2018. Kegiatan tetap berjalan walaupun tidak ada dana yang dianggarkan di program kegiatan ini. Data IKM sendiri untuk tahun 2018 didapatkan dari quisioner yang diisi oleh penyedia (LPSE) dan peserta sengketa informasi (KIP), data kemudian diolah dan didapatkan hasil sebesar 83,94 % untuk Indeks Kepuasan Masyarakat.
- Untuk program kegiatan Persentase Coverage Area yang berhubungan dengan pembangunan Menara Telekomunikasi beserta BTS, tidak mengalami peningkatan dari Tahun 2016, 2017 serta 2018. Total *coverage area* pada tahun 2018 sebesar 102 Kecamatan dan 626 Desa / Kelurahan.



3. Alternatif solusi:

- Solusi yang telah dilakukan untuk mendukung program kegiatan **Jumlah Interoperabilitas Sistem Informasi** setiap tahunnya selalu menganggarkan pendanaan namun alokasi pendanaan baru dapat terlaksana di tahun 2019.
- Untuk program kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat akan dianggarkan pendanaannya di tahun mendatang. Untuk mendapatkan indeks data yang lebih banyak maka akan diberlakukan pula sistem quisoner untuk semua layanan yang ada di Diskominfo Prov. Kaltim (LPSE dan Komisi Informasi) dan pada akhir tahun akan didapatkan angka persentase IKM keseluruhan.
- Untuk program kegiatan Persentase Coverage Area yang berhubungan dengan pembangunan Menara Telekomunikasi beserta BTS, sejak tahun 2016 telah diambil alih oleh Kominfo Pusat. Provinsi Kaltim hanya berfungsi sebagai pengumpul usulan titik pembangunan dari Kabupaten/Kota dan juga sebagai pengawas pembangunan menara telekomunikasi.

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim, seperti tabel dibawah ini :

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD/RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah Aplikasi Terintegrasi	Aplikasi	20 Sistem Informasi	0	0
2	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat dalam memperoleh informasi	Persen	55%	83,94%	28,94%
3	Persentase Coverage Area	Persen	80%	0	0

D. Capaian Kinerja Lainnya

Prestasi / kinerja lainnya yang diraih oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 tertuang dalam tabel pengharagaan sebagai berikut (di dalam Daftar Lampiran) :

**E. Realisasi Anggaran**

1. Realisasi anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja :

No	Sasaran Strategis	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Capaian	Alokasi	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya keterbukaan informasi dengan meningkatkan sistem, metode, dan mutu penyebarluasan serta pelayanan informasi kepada masyarakat	55	83,94	28,94%	0	0	0%

2. Realisasi anggaran per Program dan Kegiatan :

No	Program / Kegiatan	Anggaran			Keterangan
		Alokasi	Realisasi	% Capaian	
1	2	3	4	5	6
1	Program : Peningkatan Tata laksana Komunikasi dan Informatika Kegiatan : Pengolahan dan Inventarisasi Data dan Penyajian Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah	0	0	0%	Untuk Tahun Anggaran 2018, IKM tidak mendapatkan pagu anggaran sehingga program kegiatan pun tetap dilaksanakan tanpa adanya anggaran dana tersebut. Data IKM sendiri untuk tahun 2018 didapatkan dari quisioner yang diisi oleh penyedia (LPSE) dan peserta sengketa informasi (KIP), data kemudian diolah dan didapatkan hasil sebesar 83,94% untuk Indeks Kepuasan Masyarakat



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2018 ini merupakan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur selama satu tahun.

Berdasarkan uraian dari capaian kinerja pada tahun anggaran 2018 diatas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp. 18.011.746.000,- telah terealisasi Rp. 16.361.737.779,- atau 90,84 % untuk keuangan dan 93,23% untuk fisik
2. Capaian kinerja untuk Sasaran kinerja 2018 yaitu :
 - a. Meningkatkan sarana dan prasarana teknologi komunikasi dan informasi yang menunjang kegiatan pemerintah daerah , ditargetkan 20 aplikasi yang terintegrasi diantaranya yaitu : Teppa, Simda Keuangan, SIPPD, SIMONEP, Simpeg dan Simda-BMD namun target belum tercapai dikarenakan program kegiatan Tahun 2018 baru dianggarkan untuk Perencanaan Pengembangan Fiber Optic , sehingga tahun 2018 prosentase capaiannya sebesar 0%.
 - b. Terwujudnya keterbukaan informasi dengan meningkatkan sistem, metode, dan mutu penyebarluasan serta pelayanan informasi kepada masyarakat, ditargetkan sebesar 55% dengan tidak adanya alokasi dana untuk tahun ini sehingga tahun 2018 prosentase capaiannya sebesar 70%.
 - c. Tersedianya infrastruktur bidang komunikasi dan informasi dalam pemenuhan kebutuhan akses informasi kepada masyarakat, ditargetkan coverage area daerah yang terlayani telekomunikasi yaitu sebesar 80% (Tahun 2016 – sekarang) tetapi untuk Diskominfo Provinsi Kaltim mulai tahun 2016 tidak lagi membangun Menara Telekomunikasi beserta BTS nya karena program kegiatan ini telah diambil oleh Kominfo Pusat.

B. Saran

Melalui Laporan ini maka dapat diketahui tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim. Untuk kelanjutan pelaksanaan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim agar :

- a. Dalam membuat perencanaan program dan kegiatan lebih baik terkoordinasi, antisipatif dan terintegrasi sehingga tidak akan mengalami permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya dan mengacu pada renstra 2013-2018.



- b. Peningkatan kompetensi SDM khususnya terkait dengan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
- c. Perlunya peningkatan kerjasama dengan Lembaga/satuan kerja/organisasi/komunitas yang berkecimpung dalam program atau kegiatan Teknologi Informasi dan Komunikasi sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.